

DINAS SOSIAL KOTA CIMAHI



RENCANA KERJA PERUBAHAN
Tahun 2024

RENCANA KERJA
PERUBAHAN
DINAS SOSIAL
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan, rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2024 dapat tersusun sesuai rencana.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial Tahun 2024 adalah suatu dokumen yang menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial untuk periode 3 (tiga) bulan yang melanjutkan program dan kegiatan pembangunan urusan pemerintah bidang sosial yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman Rancangan Strategis Dinas Sosial Perubahan Tahun 2024.

Selanjutnya kami mengharapkan melalui Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2024 dapat menjadi arah dan pedoman bagi Dinas Sosial Kota Cimahi dalam mewujudkan Visi Kota Cimahi 2023-2026 yaitu Cimahi Cerdas.

Cimahi, 1 Agustus 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA CIMAHI,**

Drs. AHMAD SAEFULLOH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19711003 1999101 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Sosial Kota Cimahi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang sosial yang merupakan organisasi perangkat daerah yang baru terbentuk yang sebelumnya tergabung dalam Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rencana Kerja Dinas Sosial memuat berbagai rencana Program dan Kegiatan yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial serta selaras pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 yang menjadi pedoman dalam penyusunan seluruh rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial dilakukan pengkajian dan analisa terlebih dahulu terhadap kondisi riil lapangan, evaluasi pelaksanaan rencana kerja sebelumnya. Masalah kemiskinan di Kota Cimahi menjadi permasalahan yang harus ditangani secara serius karena akan membawa dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Adanya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesjahteraan Sosial (PPKS) di Kota Cimahi yang cukup banyak karena permasalahan ekonomi akibat dampak covid-19 sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang, oleh sebab itu penanganan masalah tersebut serta pencegahannya harus terakomodir dalam program dan kegiatan yang ada.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Nomor 86 Tahun 2017 bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah menjadi pedoman penetapan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian

dengan perkembangan keadaan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas Dinas Sosial Kota Cimahi menyusun dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) yang merupakan penjabaran dari Renstra yang dituangkan dalam setiap tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Melalui Renja Perubahan Dinas Sosial diharapkan dapat menentukan kemana arah kegiatan dan program pembangunan khususnya di bidang sosial yang hendak dicapai dan langkah-langkah untuk mencapainya. Dengan demikian dokumen Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Cimahi sangat penting untuk disusun agar semua rencana program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dapat terlaksanan dengan hasil yang maksimal.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja Dinas Sosial Kota Cimahi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2024 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);
25. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 641);
26. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 644);

27. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 139);
28. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 746, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 226)

1.3. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan pada perencanaan dan penganggaran tingkat kota, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- b. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Pergeseran pagu sub kegiatan antar bidang, penghapusan sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru/sub kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu sub kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran sub kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, bahwa perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan Penetapan Perubahan RKPD tahun berjalan.

Sedangkan dasar pertimbangan perubahan RKPD, yang ditindaklanjuti dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah, menurut ketentuan tersebut di atas, yaitu adanya perubahan pada:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;

- c. Prioritas pembangunan daerah karena adanya berbagai permasalahan yang berkembang sehingga perlu menjadi prioritas penanganan secara cepat dalam APBD Perubahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2024;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan serta sub kegiatan perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- f. Sinkronisasi penyelesaian program/kegiatan yang telah ditetapkan pada APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2024, sinkronisasi capaian sasaran Renstra Tahun 2023-2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun melalui tahapan penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari perumusan dan penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, tahapan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah serta tahapan penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

1.2.Dasar Hukum

1.3.Dasar Pertimbangan Perubahan

1.4.Sistematika Penulisan.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024**

2.1 Evaluasi Capai Renja sampai dengan Triwulan II Tahun
2024

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

3.1. Rencana Program Dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja
Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Realisasi DPA Triwulan II Tahun 2024.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan bidang sosial yang dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2024. Pencapaian kinerja tahun 2024 triwulan II tersebut didukung melalui pelaksanaan 5 program, 14 kegiatan dan 50 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.16.277.117.603,- dengan realisasi Rp.7.899.805.725,- atau 48,53 %. Secara Rinci alokasi anggaran dan realisasi per kegiatan tergambar pada realisasi belanja langsung. Pencapaian Program dan kegiatan sudah tercapai secara fisik pada semester II sebesar 49,58 %.

Anggaran program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2024 yang di rencanakan terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan diantaranya :

1. Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak terlantar dilaksanakan sesuai dengan adanya kasus.
2. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota direalisasikan apabila ada kondisi bencana dalam status tanggap darurat.
3. Sub kegiatan Kedaruratan pada Renovasi Rumah Singgah Dinas Sosial yang berlokasi di Cipageran menjadi DED Rumah Singgah Dinas Sosial karena kondisi bangunan yang tidak dimungkinkan untuk direnovasi.

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Cimahi dapat tercapai tentunya berkat dukungan dan koordinasi dari Dinas/Instansi terkait, partisipasi aktif dari masyarakat, Penyandang Pemerlu Kesejahteraan

Sosial (PPKS), Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3). Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kota Tahun Berjalan 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Dinas Sosial yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana PD Tahun 2024		Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7 = 7+8		8 = 11/6*100		9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG DISKANTAN DIKURAI PELAYANAN DASAR												
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.373.331.675		1.810.050.556		960.231.510	-	2.770.282.072		43,47	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB		BB		85,2		BB	-	BB		
		Indeks Profesionalitas ASN	50,5		83,2		85,2		100	-	336,00		
		Nilai IKM Perangkat Daerah	BB		A		A		A	-	A		
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			101.763.150		26.808.023		7.663.432	-	44.531.455		44,00	
		Jumlah fasilitas penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	2		1		-		1	-	50,00		
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			49.443.000		25.251.000		2.385.250	-	27.630.250		56,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2		1		-		1	-	50,00		
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			52.320.150		11.617.023		5.278.182	-	16.895.205		32,00	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		1		1		2	-	50,00		
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.731.825.575		1.138.194.064		840.837.408	-	1.979.031.552		42,00	
		fasilitas Gaji ASN dan Tunjangan	26		23		26		49	-	388,46		
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.683.675.725		1.126.987.691		835.869.306	-	1.962.856.997		42,00	

Kode	Urusan/Bidang/ Urusan/Program/K egiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Regulasi/Output) /Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kota Tahun Berjalan 2024 yang Direalisasi		Realisasi Kinerja Pada Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dinas Sosial yang Direalisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Keterangan
			K	Rp	I	K	Rp	II	K	Rp	K	Rp	
1.06.01. 2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang yang Menor- tasi dan Tunjangan ASN	23		23		26	4.966.182	49	-	213.04	34.00	
		Jumlah Laporan Keuan- gan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kom- dikasi Penyusunan Lape- rnis Keuangan Akhir Tahun SKPD	2		1	-			1	-	90.00		
1.06.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jam pelajaran blimbingan teknis kompe- tensi yang diikuti oleh ASN	20	177.349.850	174.628.000	-		-	20	-	100.00	98.00	
1.06.01. 2.05.11	Blimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perun- dangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Blimbingan Tek- nis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23	177.349.850	174.628.000	22			23	-	100.00	98.00	
1.06.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Tahun hasil- basi penyediaan administrasi umum perangkat daerah	1	688.736.200	58.360.500	1	64.963.100		2	-	200.00	18.00	
1.06.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran- gan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	16.597.000	14.190.500	-			1	-	100.00	86.00	
1.06.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			458.058.700	15.680.000		23.254.400		-	38.934.400		8.00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome / Kegiatan / Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kota Tahun Berjalan 2024 yang Direalisasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dinas Sosial yang Direalisasi		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Keterangan
			K	Rp	I	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	
		Jumlah Paket Perawatan dan Peningkatan Kantor yang Diselesaikan	1		1		1		2	-	200,00		
1.06.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			38.894.300	6.377.000		11.830.000	-	18.207.000			47,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diselesaikan	1		1		1		2	-	100,00		
1.06.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengiriman			27.592.400	13.208.000		560.700	-	13.768.700			50,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengiriman yang Diselesaikan	1		1		-	1	-	-	100,00		
1.06.01. 2.06.08	Facilitas Kunjungan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	9.000.000	-		840.000	-	840.000	-		9,00	
			1		1		1		2	-	100,00		
1.06.01. 2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			338.593.800	11.925.000		28.478.000	-	37.403.000			27,00	
		Jumlah Laporan Penye- nggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1		1		1		2	-	100,00		
1.06.01. 2.07	Penyediaan Barang Modal Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			353.000.000	353.000.000		-	-	353.000.000			100,00	
		Jumlah Tahun Fasilitas sarana gedung/ kantor	1		1		-	1	-	-	100,00		
1.06.01. 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			353.000.000	353.000.000		-	-	353.000.000			100,00	
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diselesaikan	3		3		-	3	-	-	100,00		
1.06.01. 2.08	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			190.654.950	22.958.546		20.964.314	-	43.922.860			23,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/K egiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output) /Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kota Tahun Berjalan 2024 yang Direvisi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dinas Sosial yang Direvisi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Tahun Penilaian Penyediaan Jasa Pemus- jangan Penyelenggaraan Daerah	1		1		1		2	-	100,00		
1.06.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disiapkan	1	68.100.000		380.050		2.177.950	-	2.558.000	4,08		
1.06.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Perumahan dan Pertengahan Kantor	Jumlah Laporan Penyedi- aan Jasa Perumahan dan Pertengahan Kantor yang Disiapkan	1	19.979.950		369.950		5.890.000	-	6.259.950	31,00		
		Jumlah Laporan Penyedi- aan Jasa Perumahan dan Pertengahan Kantor yang Disiapkan	1		1		1		2	-	100,00		
1.06.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Urus Kantor	Jumlah Laporan Penyedi- aan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan	1	102.575.000		22.208.540		12.896.364	-	35.104.010	34,00		
1.06.01. 2.09	Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Pemus- jangan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah unit penyelenggaraan barang milik daerah	2	130.001.950		26.021.423		25.803.182	-	51.824.605	40,00		
1.06.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan, Biaya Penyelenggaraan, Pajak, dan Perawatan Kerdaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kerdaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disiapkan dan dite- yarkannya Pajak dan Perle- tihanannya	2	130.001.950		26.021.423		25.803.182	-	51.824.605	40,00		
1.06.02	PROGRAM PEMERIKHAAN SOSIAL	Perentase LKS yang mendapatkan pengujian kelembagaan	76,9 2	9.020.327.050		418.400.602		232.739.095	-	647.229.697	32,04		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/K egiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output /Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Kota Tahun Berjalan 2024 yang Direvaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Ditus Sosial yang Direvaluasi		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana PD Tahun 2024		Keterangan
			K	Rp	I	II	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyerasan PKKS dan PSKS yang dididik, yang men- dapatkan pelatihan dan bimbingan teknis	20		5		5		10	-	30,00		
1.06.02. 2.03	Pengembangan Jerni Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			2.020.327.050		414.490.602		332.739.095	-	647.229.697		32,00	
		Potensi Sumber Kese- jahteraan Sosial Daar- di Kab/Kota dalam mendapatkan kemua- nuannya	28		28		28		56	-	100,00		
1.06.02/ 2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kemasyarakatan Kabupaten/Kota			785.904.250		181.249.164		104.715.003	-	285.968.167		36,00	
		Jumlah Orang Mendu- pai Pendidikan Ka- pasitas Pekerja Sosial- Masyarakat Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	18		18		18		36	-	100,00		
1.06.02. 2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kese- jahteraan Sosial Kecamatan Kemasyarakatan Kabupaten- en/Kota			141.056.000		29.376.819		19.704.546	-	49.081.365		35,00	
		Jumlah Tenaga Kese- jahteraan Sosial Kecamatan Kemasyarakatan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kapasitas Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	6		6		6		12	-	100,00		
1.06.02. 2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kese- jahteraan Sosial Kecamatan Masyarakat Kemasyarakatan Kabupaten/Kota			923.448.000		175.117.800		91.765.000	-	266.882.800		29,00	
		Jumlah Lembaga Kese- jahteraan Sosial yang Mendapatkan Kapabilitas Kemasyarakatan Kabupaten- en/Kota	6		-		2		2	-	33,33		
1.06.02. 2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kesejahteraan Kelu- arga (LK3)			169.918.000		28.746.819		16.554.546	-	45.301.265		27,00	
		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kemasyarakatan Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	3		-		3		3	-	100,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/K egiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan/Output /Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Pengantar Daerah Kons Tahun Berjalan 2024 yang Divaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Ditus Sosial yang Divaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana PD Tahun 2024		Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			1.753.677.728		217.248.680		331.575.206	-	548.823.896		31.30	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti	100		100		100		100	-	100		
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi hak dasarnya.	100		100		100		100	-	100		
		Persentase pengambilan dan pengembalian yang mem- peroleh rehabilitasi sos- al dasar rumah sosial elih- ar panti	100		100		100		100	-	100		
		Persentase lanjut usia ter- lanjut yang terpenuhi kebu- tuhannya dasarnya diluar panti	100		100		100		100	-	100		
1.06.04. 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Ter- lantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Ge- lombang Penyandang di Luar Panti Sosial			1.627.245.728		191.568.680		323.681.206	-	515.249.886		30.00	
		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Ter- lantar, serta pengambilan pengembalian di luar Pan- ti Sosial	100		100		100		100	-	100.00		
1.06.04. 2.01.01	Penyediaan Perumahan			88.160.000		22.140.000		20.070.000	-	42.210.000		48.00	
		Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Cak Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	865		514		514		1.028	-	118.84		
1.06.04. 2.01.02	Penyediaan Kandang			135.090.000		850.000		7.700.000	-	8.550.000		6.00	
		Jumlah Orang yang Menem- pakan dan Kelangka- pan Zakunya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	870		219		600		419	-	94.14		
1.06.04. 2.01.03	Penyediaan Alat Bantu			171.911.100		6.316.100		153.405.000	-	159.725.100		93.00	
		Jumlah Orang yang Men- dapatkan Alat Bantu dan Alat	84		50		108		158	-	188.10		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Keputusan/Output/ Sub Kegiatan)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Pertanggungjawaban 2024 yang Dieralisasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana yang Dieralisasi		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana PD Tahun 2024		Keterangan
			K	Rp	I	II			K	Rp	K	Rp	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Pendidikan Kecerdasan Keluarga	Bantu Orang yang Merupakan Kecerdasan Keluarga		9.600.000	2.520.000	1.680.000			-	4.200.000		44.00	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kecerdasan Keluarga Kecerdasan Keluarga	16		9	9			18	-	112.50		
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kecerdasan Keluarga/Kota	700		547	575			1.122	-	160.29		
1.06.04.2.01.07	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Perempuan dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Perempuan dan Masyarakat Kecerdasan Keluarga/Kota	450		-	650			650	-	144.44		
1.06.04.2.01.08	Pemberian Bantuan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Perempuan dan Masyarakat	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pendidikan, Sosial, dan Kesehatan, serta Kebutuhan Anak bagi Penyandang Disabilitas	24		-	-			-	-	-		
1.06.04.2.01.09	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesejahteraan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesejahteraan Kecerdasan Keluarga/Kota	24		6	6			12	-	50.00		
1.06.04.2.01.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesejahteraan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesejahteraan Kecerdasan Keluarga/Kota	24		6	6			12	-	50.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renc Perangkat Daerah Kota Tahun Belanja 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renc Dinas Sosial yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renc PD Tahun 2024		Keterangan
			K	Rp	I	II	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.04. 2.01.09	Pemberian Layanan Tata dan Pengaturan			65.378.100	9.100	7.178.000	-	7.187.100				11.00	
		Jumlah Orang yang Men- dapatkan Layanan Tata dan Pengaturan Kewenangan- gan Kabupaten/ Kota	24		6	0			12	-	50.00		
1.06.04. 2.01.10	Pemberian Layanan Kedarmatan			303.491.278	9.608.000	4.480.000	-	14.088.000			8.33	5.00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedarmatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	144		6	6			12	-			
1.06.04. 2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			6.920.000	1.680.000	1.120.000	-	2.800.000				40.00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	24		6	6			12	-	50.00		
1.06.04. 2.01.12	Pemberian Layanan Rutin			83.760.000	19.130.230	13.169.206	-	32.269.436				39.00	
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rutin Kew- nangan Kabupaten/ Kota	24		6	6			12	-	50.00		
1.06.04. 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kecelakaan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			56.432.000	25.080.000	7.894.000	-	33.574.000				59.00	
		Partisipasi Penyandang Masalah Kecelakaan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sos- al yang terpenuhi kebutuhan daunnya	100		100	100			200	-	200.00		
1.06.04. 2.02.03	Pengeduk Perbaikan			16.800.000	-	-	-	-				-	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Perbaikan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Cost Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	50		-	-			-	-		-	

Kode	Urusan/Bidang/ Urusan/Program/K egiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan/Output) /Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkoat Daerah Kota Tahun Berjalan 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Dinas Sosial yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana PD Tahun 2024		Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.06.04. 2.02.01	Pemberian Layanan Diet dan Pengaturan			6.327.000		-		6.774.000	-	6.774.000		81,00	
		Jumlah Orang yang Mer- dapatkan layanan Diet dan Pengaturan Keperuan- gan Kabupaten/Kota	24		6		4		10	-	41,67		
1.06.04. 2.02.02	Pemberian Layanan Kedokteran			7.200.000		1.080.000		1.120.000	-	2.800.000		29,00	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedokteran Keperawatan Kabupaten/Kota	24		6		4		10	-	41,67		
1.06.04. 2.02.06	Pengelolaan Perbaikan Kesehatan di Luar Panti			24.105.000		24.000.000		-	-	24.000.000		100,00	
		Jumlah Orang yang Men- dapatkan Pemenuhan Ke- butuhan Perbaikan Kese- hatan di Luar Panti Keper- awatan Kabupaten/Kota	24		24		-		24	-	100,00		
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			5.320.137.950		82.098.346		1.352.234.864	-	1.434.333.210		26,96	
		Persentase Pemutakhiran data DTKS, PRKS dan Rasio	20		5		5		10	-	50,00		
		Persentase PRKS den- gan kategori tertantu yang mendapat jumlah soal	100		100		100		100	-	100		
		Persentase Anak tertantu yang tertantu	100		100		100		100	-	100		
		Persentase KPM dalam DTKS yang masuk program PBI JK APIJN dan APIJN	34		76		79		155	-	455,88		
		Persentase KPM PRK yang gagal	4,25		-		1		1	-	25,00		
1.06.05. 2.02	Pengelolaan Jasa Pakat Makan Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			5.177.241.550		79.298.346		1.352.234.864	-	1.431.533.210		28,00	

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kota Tahun Berjalan 2024 yang Divaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dinas Sosial yang Divaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Keterangan
			K	Rp	I	K	Rp	II	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Tahun Fasilitas segitiga peninggalan dan pemeliharaan data	1		1			1	2	-	200,00		
1.06.05.2.02.01	Pembiayaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten- ra/ Kota			471.584.800			13.043.800	26.972.500	-	40.016.300		8,00	
		Jumlah Fakir Miskin Caka- pan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	40,000		10,260			250	10,510	-	0,65		
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota			222.892.000			19.684.546	14.416.364	-	34.100.910		15,00	
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengiriman Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	10,000		2,250			-	2,250	-	22,50		
1.06.05.2.02.03	Realisasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.500		2,250			2,156	4,406	-	293,73		
1.06.05.2.02.04	Realisasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			70.919.750		-		840.000	-	840.000		1,00	
		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten- ra/ Kota	30		-			-	-	-	-		
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			142.796.400			2.800.000	-	-	2.800.000		2,00	
		Terlaksananya kegiatan pemungutan anak-anak terlantar	3		-			-	-	-	-		
1.06.05.	Pengasupan Anak			61.145.350			2.800.000	-	-	2.800.000		5,00	

Kode	Urusan/Bidang/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah Kota Tahun Berjalan 2024 yang Dicevaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dinas Sosial yang Dicevaluasi		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.01.01	Anak Terlantar										
		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Lijangkau Kewenangan Rpt. Kabupaten/Kota	20		-		-		-		
1.06.05.2.01.03	Pemenuhan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar			60.027.400	-		-		-		
		Jumlah Anak Terlantar yang Terpenuhi dan Terpilih. born Kewenangan Kabupaten/Kota	8		-		-		-		
1.06.05.2.01.02	Rajukau Anak-Anak Terlantar			20.723.650	-		-		-		
		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Bar. jumlah Kewenangan Kabupaten/Kota	8		-		-		-		
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			809.643.200	123.582.657	103.812.638	-	227.395.295	-	28.09	
		Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100		100		100	-	100		
		Persentase SDM relawan kebencanaan yang mendapatkan pembinaan dan jaminan sosial	100		100		100	-	100		
1.06.06.2.01	Pertindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			185.639.000	-		-		-		
		Persentase Pertindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100		100		100	-	100		
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan			70.030.000	-		-		-		

Kode	Urusan/Bidang/ Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome)/Kegiatan(Output) /Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah Kota Tahun Belanja 2024 yang Direvaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dinas Sosial yang Direvaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Keterangan
			K	Rp	I	II			K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemukiman 3x1 Haul dalam Masa Tang-gap Darurat (Pengungsian) dan Kewenangan Kabupaten/Kota	100		-	-	-	-	-	-	-	-	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sarung			54.773.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.06.06.2.01.03	Berwujudnya Tempat Pemangsaan Pengungsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakan dan Ke-berhasilan Lainnya yang Terwujud pada Masa Tang-gap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100		-	-	-	-	-	-	-	-	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Ber-cara yang Mendapat- akan Layanan Dukun- gan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	10	11.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemangsaan Khusus bagi Kelom-pok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	24.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat ter- hadap Keselamatan Bencana Kabupaten/Kota			624.004.200	123.562.657	103.812.638	-	227.395.295	36.00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/K egiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Outpu) /Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kota Tahun Berjalan 2024 yang Divaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Dinas Sosial yang Divaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024		Keterangan
			K	Rp	I	Rp	II	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Unit pelatihan penyelenggaraan Pember- dayaan ter- bidang kewirausahaan ber- cina	12		3		3		6	-	50,00		
1.06.06. 2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Turuna Siaga Bencana			567.217.000		120.419.567		77.176.636	-	197.598.595		35,00	
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelak- sanaan Turuna Siaga Ben- cina Kewirausahaan Kabu- paten/ Kota	35		35		35		35	-	100,00		
1.06.06. 2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana			56.787.200		3.162.700		26.634.000	-	29.790.700		52,00	
		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Ben- cina Kewirausahaan Kabu- paten/ Kota	1		-		1		1	-	100,00		

2.2 Evaluasi Terhadap Kesesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024

Kesesuaian Program Antara Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024 Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada Rencana Kerja Dinas Sosial dengan APBD Tahun 2024, terdapat kesesuaian 100%, artinya bahwa jumlah program dalam Renja seluruhnya dilaksanakan dalam APBD, yaitu terdapat 5 program pada Renja dan 5 program pada APBD yang terdiri dari 1 program urusan pendukung pemerintahan dan 4 program urusan Sosial.

Seperti halnya evaluasi program, untuk kegiatan yang ada di Renja Dinas Sosial dengan APBD tahun 2024 terdapat kesesuaian 100%, yaitu jumlah kegiatan yang ada di Renja sebanyak 14 kegiatan. dan untuk sub kegiatan terdapat kesesuaian, yaitu jumlah sub kegiatan yang ada di Renja sebanyak 50 sub kegiatan, sedangkan yang ada di APBD sebanyak 50 sub kegiatan.

Untuk anggaran yang ada di dokumen Renja dan APBD, setelah dievaluasi terdapat perbedaan dengan adanya pengurangan anggaran dalam penetapan APBD. Kebutuhan anggaran yang diusulkan dalam Renja Dinas Sosial Tahun 2024 sebesar Rp.15.037.536.975,-, sedangkan dalam penetapan APBD 2024 sebesar Rp. 16.277.117.603 penambahan anggaran disebabkan adanya beberapa kegiatan yang ditambah volume nya .

BAB III

Rencana Program Dan Kegiatan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2024

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2024 ini memuat tentang kegiatan lanjutan, kegiatan yang dihapus, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2024 berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dan RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

3.1 Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja Dinas Sosial Tahun 2024

Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 50 sub kegiatan, terdapat 30 Sub Kegiatan (60%) yang mengalami perubahan dan 20 Sub Kegiatan (40%) yang tidak mengalami perubahan anggaran. Adapun rincian perubahan kegiatan dalam Perubahan Renja

3.2 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2024

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan/sub kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2024;
2. Penyesuaian dengan kebijakan dari penganggaran, terutama yang terkait dengan program prioritas kota;
3. Penambahan anggaran belanja pegawai yang menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2024.

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan Renja Dinas Sosial Kota Cimahi tahun 2024 dapat dilihat pada tabel.

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendermaan				
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 21
2	3	4	8	9	10	11	12
	Dinas Sosial				15.037.536.975,00	16.277.117.603,00	16.318.022.603,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.037.536.975,00	16.277.117.603,00	16.318.022.603,00
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				15.037.536.975,00	16.277.117.603,00	16.318.022.603,00
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan umum Nilai Siskip Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN	100 50 51 Persen Nilai	100 50 51 Persen Nilai	6.482.232.825,00	6.373.331.575,00	6.356.640.053,00
1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	106.463.200,00	101.763.150,00	101.763.150,00
1 06 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	53.023.000,00	49.443.000,00	38.923.000,00
1 06 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	53.440.200,00	52.320.150,00	49.504.150,00
1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Fasilitas Gaji ASN dan Tunjangan	26 orang	26 orang	5.082.384.352,00	4.731.825.575,00	4.731.825.575,00
1 06 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	5.033.674.252,00	4.683.675.775,00	4.683.681.103,00
1 06 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	48.710.100,00	48.149.850,00	47.133.850,00
1 06 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jam pelajaran bimbingan teknis kompetensi yang diikuti oleh ASN	20 JP	20 JP	235.498.000,00	177.349.850,00	177.349.850,00
1 06 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2x
2	3	4	8	9	10	11	12
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23 Orang	23 Orang	235.498.000,00	177.349.850,00	174.628.000,00
1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Tahun fasilitasi penyediaan administrasi umum perangkat daerah	1 Tahun	1 Tahun	348.692.025,00	688.736.200,00	688.736.200,00
1 06 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.565.000,00	16.597.000,00	16.597.000,00
1 06 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Penghapusan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Penghapusan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	220.526.025,00	458.058.700,00	484.305.550,00
1 06 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	44.414.600,00	38.894.300,00	38.894.300,00
1 06 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	27.592.400,00	27.592.400,00	27.592.400,00
1 06 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
1 06 01 2.06 0009	Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	138.594.800,00	138.593.800,00	174.713.800,00
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tahun Fasilitas sewa gedung/kantor	1 Tahun	1 Tahun	353.000.000,00	353.000.000,00	353.000.000,00
1 06 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	3 Unit	4 Unit	353.000.000,00	353.000.000,00	353.000.000,00
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tahun Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	185.405.000,00	190.654.950,00	190.654.950,00
1 06 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kinerja Pembiaran				
			Target 2024		Pagu Indikasi (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 21
2	3	4	8	9	10	11	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	68.100.000,00	68.100.000,00	19.020.000,00
1 06 01 2.06 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	14.730.000,00	19.979.950,00	19.979.950,00
1 06 01 2.06 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	102.575.000,00	102.575.000,00	96.088.000,00
1 06 01 2.09 0002	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah	2 unit	2 unit	170.790.248,00	130.001.950,00	130.001.950,00
1 06 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	2 Unit	2 Unit	170.790.248,00	130.001.950,00	123.578.950,00
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PKKS dan PSKS yang didik yang mendeskripsikan pelatihan dan bimbingan teknis Prosentase UKS yang mendapatkan penguatan kelembagaan	20 92,31 persen persen	20 92,31 persen persen	2.095.605.700,00	2.020.327.090,00	2.020.326.550,00
1 06 02 2.03 0001	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pedanal Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota dalam meningkatkan kemampuannya	28 orang	28 orang	2.095.605.700,00	2.020.327.090,00	2.020.327.050,00
1 06 02 2.03 0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	18 Orang	828.375.600,00	785.904.250,00	819.208.750,00
1 06 02 2.03 0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	6 Orang	6 Orang	146.944.000,00	141.056.000,00	134.456.000,00

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RPD 2024	APBD 2024	RPD Perubahan 21	
2				3		4		8	9	10		11	12
				Kabupaten/Kota									
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelangkaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	6 Lembaga			899.244.100,00	923.448.800,00	935.643.800,00	
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)								
					Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Sertifikat	3 Sertifikat			229.042.000,00	169.018.000,00	130.018.000,00	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								
					Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	100 100 persen Person	100 100 Person person			1.451.346.950,00	1.753.677.728,00	1.781.749.450,00	
					Prosentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NARZA diluar panti								
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 Person	100 Person			1.391.714.450,00	1.697.245.728,00	1.697.245.728,00	
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan								
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	865 Orang	865 Orang			103.960.000,00	88.160.000,00	111.260.000,00	
1	06	04	2.01	0002	Penyelesaian Sandang								
					Jumlah Orang yang Menerima Pelayanan dan Kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	870 Orang	870 Orang			135.090.000,00	135.090.000,00	135.090.000,00	
1	06	04	2.01	0003	Penyelesaian Alat Bantu								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
			Target 2024		Ragu Indikator (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2X
2	3	4	8	9	10	11	12
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	84 Orang	84 Orang	173.511.100,00	173.911.100,00	171.911.100,00
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	16 Orang	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Orang	700 Orang	666.833.250,00	647.113.250,00	759.847.250,00
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terhenti, Anak Terhenti, Lanjut Usia Terhenti, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terhenti, Anak Terhenti, Lanjut Usia Terhenti, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang	450 Orang	178.022.000,00	175.022.000,00	158.977.000,00
1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan		
		Jumlah Orang yang Terpenuhi kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	24 Orang	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	24 Orang	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	24 Orang	65.378.100,00	65.378.100,00	65.378.100,00
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedokteran		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
			Target 2024		Pagu Indikator (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2025
2	3	4	8	9	10	11	12
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaurutan Kewenangan Kabupaten/Kota	144 Orang	144 Orang	34.680.000,00	303.491.278,00	210.774.000,00
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	24 Orang	6.920.000,00	6.920.000,00	6.920.000,00
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan		
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	24 Orang	6.920.000,00	83.760.000,00	83.760.000,00
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 Persen	100 Persen	59.632.500,00	56.432.000,00	56.432.000,00
1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	24 Orang	6.327.500,00	6.327.000,00	8.327.000,00
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaurutan		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaurutan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	24 Orang	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	15.800.000,00	16.800.000,00
1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perlengkapan Kesehatan di Luar Panti		

Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
						Target 2024		Ragu Indikator (Rp)			
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 21	
2		3		4		8	9	10	11	12	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbaikan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota		24 Orang	24 Orang	24.105.000,00	24.105.000,00	24.105.000,00	
1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase Pemutakhiran data OTKS, PKCS dan Bansos	100 20 persen perken	20 100 persen perken	4.175.667.300,00	5.320.137.950,00	5.424.533.350,00	
				Prosentase anak terlantar yang tertangani							
1	06	05	2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya kegiatan penanganan anak-anak terlantar	3 Kegiatan	3 Kegiatan	145.616.900,00	142.796.400,00	142.796.400,00	
1	06	05	2.01	0001	Penjaga-tuan Anak-Anak Terlantar						
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Diangku	20 Orang	20 Orang	61.145.600,00	61.145.350,00	61.145.350,00	
				Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar						
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	8 Orang	21.323.900,00	20.723.650,00	20.723.650,00	
1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar						
					Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpeltara Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	8 Orang	60.927.400,00	60.927.400,00	60.927.400,00	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	1 Tahun	4.030.050.400,00	5.177.341.550,00	5.177.341.550,00	
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	40000 Orang	40000 Orang	515.050.000,00	471.584.800,00	400.908.000,00	
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
					Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	10000 Keluarga	10000 Keluarga	207.519.000,00	222.892.000,00	222.466.000,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
			Target 2024		Ragu Indikator (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 21	
2	3	4	8	9	10	11	12	
1 06 05 2.02 0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1300 Keluarga	2250 Keluarga	3.227.481.600,00	4.403.945.000,00	4.579.443.200,00	
1 06 05 2.02 0004	FastTrack Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	80.000.000,00	78.919.750,00	78.919.750,00	
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100 persen	100 persen	832.684.200,00	809.643.200,00	734.773.200,00	
1 06 06 2.01	Perfindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Prosentase Perfindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 Persen	100 Persen	191.250.000,00	185.639.000,00	185.639.000,00	
1 06 06 2.01 0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Makanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	50 Orang	70.050.000,00	70.050.000,00	28.425.000,00	
1 06 06 2.01 0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakain dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	50 Orang	54.800.000,00	54.773.000,00	23.740.000,00	
1 06 06 2.01 0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Unit	2 Unit	30.000.000,00	24.436.000,00	43.904.000,00	
1 06 06 2.01 0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5 Orang	24.500.000,00	24.500.000,00	9.800.000,00	

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024				Pagu Indikator (Rp)				
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
								8	9	10	11
2											
1 05 06 2.01 0005	Pelayanan Dukungan Psikososial		10 Orang	5 Orang	11.900.000,00	11.900.000,00	4.900.000,00				
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota									
1 06 06 2.02	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah bulan fasilitasi peningkatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	12 bulan	12 bulan	641.434.200,00	624.004.200,00	624.004.200,00				
1 06 06 2.02 0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	1 Kampung	59.427.200,00	56.787.200,00	56.787.200,00				
1 06 06 2.02 0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Teruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Teruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	35 Orang	582.007.000,00	567.217.000,00	567.217.000,00				
			JUMLAH								
			15.037.536.975,00	16.277.117.603,00	16.318.022.60						

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2024 disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari 5 Program, 14 Kegiatan dan 50 sub Kegiatan. Jumlah anggaran Tahun 2024 Secara keseluruhan berjumlah Rp. 16.318.022.603,-.

Pelaksanaan rencana kerja tergantung sepenuhnya kepada kebijakan yang akan dilaksanakan, serta sejauh mana kinerja serta dukungan sumber daya yang dimiliki baik sarana maupun prasarana yang ada, Kaidah-kaidah yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, sebagai berikut :

1. Melakukan sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari dana APBD, APBN dan sumber lainnya harus membuat rencana kerja yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
2. Menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, Kepala Dinas Sosial wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan tahun 2024 melalui upaya koreksi dan penyampaian hasil evaluasi kepada Wali Kota melalui kepala Bappelitbanda setiap Triwulan.
3. Melakukan koordinasi yang maksimal dengan semua pihak yang mempunyai keterkaitan program dan kegiatan baik secara vertikal maupun interen sehingga ketercapaian program dan kegiatan bisa sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Cimahi, 1 Agustus 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA CIMAHI,**

Drs. AHMAD SAEFULLOH, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19711003 1999101 1 002